

ANALIS PERAN DESENTRALISASI SEBAGAI SOLUSI UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

Septiyandri Sya'bani Zidane¹, Desi Mehliyana², Davina Indah Ramadhani³,
Muhammad Rizki⁴, Muhammad Rusdan⁵, Syalsabila⁶, Citra Darminto⁷.

Program studi sarjana ilmu pemerintahan, Universitas Jambi

Abstrak

Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia menjadi salah satu masalah yang signifikan dalam memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan lebih dari 17 ribu pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Indonesia menghadapi tantangan geografis dan demografis dalam menciptakan pemerataan pembangunan. Faktor-faktor seperti perbedaan sumber daya alam, kondisi demografis, infrastruktur yang tidak merata, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan menjadi penyebab utama ketimpangan ini. Akibatnya, muncul kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan peluang ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, desentralisasi diimplementasikan melalui pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi memberikan peluang bagi daerah untuk menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan lokal melalui mekanisme seperti otonomi daerah, dana alokasi khusus, otonomi khusus, dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kesiapan masing-masing daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Artikel ini mengupas penyebab ketimpangan pembangunan, peran desentralisasi dalam mengatasi masalah tersebut, serta bentuk penerapan desentralisasi di Indonesia sebagai upaya menuju pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Analisis, Ketimpangan Pembangunan, Desentralisasi, Otonomi

PENDAHULUAN

Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia merupakan masalah yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial maupun ekonomi. Indonesia yang memiliki 17 ribu pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke tentu menghadapi tantangan geografis dan demografis untuk mengatasi masalah ketimpangan pembangunan. Ketimpangan ini sangat kontras apabila kita membandingkan antara daerah maju dengan daerah tertinggal. Contoh perbandingan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi DKI Jakarta sebesar 83,08 sedangkan IPM provinsi Papua Pegunungan sebesar 53,42.¹ Dari data tersebut mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur, adanya ketimpangan pembangunan ini memiliki dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat seperti dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan selain itu juga ketimpangan ini bisa mengakibatkan kecemburuan dari daerah – daerah tertinggal. Dalam hal ini hadirnya desentralisasi yang diharapkan sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia.

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia. [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi. (15 November 2024).

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”² dari undang – undang diatas dapat dilihat bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, Desentralisasi di Indonesia dianggap sesuai karena diasumsikan bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat di wilayahnya. Selain itu, pemerintah pusat tidak mungkin dapat menangani seluruh urusan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks secara langsung.³ desentralisasi diharapkan dapat memberikan ruang kepada daerah daerah otonom untuk mengatur atau mengelola potensi daerahnya untuk mempercepat mengatasi ketimpangan pembangunan. Desentralisasi memberikan peluang bagi sebuah daerah untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah masing masing. Tetapi keberhasilan desentralisasi bergantung pada kesiapan daerah otonomi masing – masing. Dengan penjelasan yang sudah dipaparkan artikel ini berfokus pada 1) memahami faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia, 2) peran Desentralisasi dalam mengatasi ketimpangan daerah di Indonesia, 3) bentuk penerapan desentralisasi di indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif analisis yang terlihat dari pendekatan dalam mendeskripsikan fakta dan menganalisis penyebab ketimpangan pembangunan di Indonesia. Penulis memulai dengan menggambarkan fenomena ketimpangan pembangunan antar wilayah, seperti perbedaan mencolok dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara DKI Jakarta dan Papua Pegunungan. Fakta-fakta ini kemudian dianalisis untuk memahami hubungan antara berbagai faktor, seperti perbedaan sumber daya alam, kondisi demografis, infrastruktur yang tidak merata, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab ketimpangan di indonesia

terdapat faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah, yaitu: 1) Perbedaan kandungan sumber daya alam 2) Perbedaan kondisi demografis 3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa 4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah 5) Alokasi dana pembangunan daerah.⁴

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Setiap wilayah di Indonesia memiliki kandungan sumber daya alam yang berbeda-beda. Wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan kaya akan sumber daya seperti minyak, gas, dan tambang, sedangkan beberapa

² Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 (8), (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).

³ Simatupang, P., & Akib, H. *Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks desentralisasi pemerintahan*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, Vol 2(1). (2011)

⁴ Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. Determinan ketimpangan pembangunan ekonomi antarprovinsi di indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, Vol 2(1), (2022) Hlm 1-16.

wilayah lain yang memiliki sda tetapi tidak sebanyak yang ada di wilayah lain atau daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak tetapi tidak bisa mengelola sumber daya alam tersebut. Ketimpangan ini menyebabkan daerah yang kaya sumber daya menjadi lebih maju karena pendapatannya tinggi, sementara daerah lain tertinggal.

2. Perbedaan kondisi demografis

Demografi memainkan peran penting dalam menentukan tingkat pembangunan suatu wilayah. Daerah dengan populasi yang tinggi dan tenaga kerja produktif, seperti Jawa, cenderung lebih berkembang. Sebaliknya, wilayah yang berpenduduk sedikit atau memiliki angka ketergantungan tinggi, seperti Papua, sering kali mengalami kesulitan dalam mencapai pembangunan yang merata.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Infrastruktur yang tidak merata di seluruh Indonesia menjadi hambatan utama dalam mobilitas barang dan jasa. Wilayah dengan infrastruktur yang baik, seperti Jawa, dapat menghubungkan aktivitas ekonomi dengan lebih efisien dibandingkan daerah yang sulit diakses seperti Maluku atau Papua. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses ke pasar, peluang bisnis, dan pertumbuhan ekonomi.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Kegiatan ekonomi Indonesia sangat terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa. Jakarta, misalnya, menjadi pusat ekonomi nasional, sementara daerah lain lebih banyak bergantung pada sektor primer seperti pertanian atau perikanan. Ketimpangan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

5. Alokasi dana pembangunan daerah

Dana pembangunan daerah sering kali tidak dialokasikan secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Ada daerah yang mendapatkan anggaran besar tetapi pengelolaannya kurang optimal, sementara daerah lain yang sangat membutuhkan justru kekurangan dana. Kebijakan fiskal yang belum sepenuhnya merata ini memperburuk ketimpangan pembangunan.

B. Peran Desentralisasi mengatasi ketimpangan pembangunan

Pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau desentralisasi, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan. Mengapa demikian karena adanya otonomi daerah sebagai hasil dari adanya desentralisasi. Menurut UU No 23 Tahun 2014 “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁵

Otonomi daerah menjadi konsep utama dalam memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya. Melalui otonomi daerah, pemerintah, termasuk pemerintahan desa, memperoleh kewenangan untuk membuat keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Pemberian otonomi bukan sekadar memberikan kebebasan, tetapi juga menuntut tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal untuk memajukan daerah. Otonomi daerah berperan sebagai alat penting dalam mempercepat pembangunan, karena pemerintah daerah yang berada dekat dengan masyarakat dapat lebih memahami kebutuhan mereka dan memberikan respons yang lebih cepat dan efektif.⁶

C. penerapan desentralisasi di indonesia

Desentralisasi di Indonesia diterapkan melalui otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Berikut adalah beberapa contoh penerapan desentralisasi di Indonesia:

1. Otonomi Daerah

Pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Contohnya, pengelolaan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

⁵ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 (6), (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).

⁶ Handraini, H., Frinald, A., Magriasti, L., & Hendranaldi. *Konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Indonesia*. Jurnal Professional, Vol 11(2), (2024), 601-608.

Pemerintah pusat memberikan anggaran kepada daerah melalui DAK dan DAU untuk mendukung program-program pembangunan lokal. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan di daerah terpencil.

3. Otonomi Khusus

Otonomi khusus lahir dari konsep desentralisasi asimetris, yaitu pengaturan kewenangan khusus yang diterapkan pada daerah-daerah tertentu. Pendekatan ini dipandang sebagai alternatif untuk mengatasi persoalan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁷ contohnya seperti di Aceh Otonomi melalui desentralisasi asimetris di Aceh telah memberi wewenang kepada provinsi tersebut untuk mengembangkan model pembangunan berbeda dan model demokratisasi yang unik berbasis pada kebudayaan masyarakatnya yang mewariskan nilai-nilai agama dan adat yang kuat. Otonomi ini memberikan keistimewaan tertentu bagi Aceh, sehingga pelaksanaan dan inovasinya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.⁸

4. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung oleh masyarakat di daerah masing-masing merupakan bentuk nyata dari demokrasi desentralisasi. Mekanisme ini memungkinkan warga daerah untuk terlibat aktif dalam menentukan pemimpin yang dianggap mampu merepresentasikan aspirasi mereka dan memenuhi kebutuhan spesifik wilayah tersebut. mekanisme ini mencerminkan pentingnya prinsip otonomi daerah, di mana masyarakat lokal diberi ruang untuk menentukan arah pembangunan daerah mereka, sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia merupakan tantangan besar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan sumber daya alam, kondisi demografis, infrastruktur yang tidak merata, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan yang tidak proporsional. Ketimpangan ini berdampak signifikan

⁷ Istanti, D. J., Febriani, A., & Ariani, N. *Desentralisasi Asimetris dalam Resolusi Konflik Separatisme Aceh dan Papua. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 7(2), (2021), Hlm 257-269.

⁸ Sanur, D. (2020). Implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh [implementation of special autonomy policies in Aceh]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 65-83.

terhadap akses masyarakat terhadap layanan dasar, tingkat kesejahteraan, dan stabilitas sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, desentralisasi menjadi solusi yang diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Penerapan desentralisasi, seperti otonomi daerah, dana alokasi khusus, otonomi khusus, dan pemilihan kepala daerah secara langsung, menunjukkan adanya ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Namun, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, meningkatkan infrastruktur, memastikan transparansi dalam pengelolaan dana, serta membangun kapasitas sumber daya manusia di daerah. Evaluasi kebijakan desentralisasi secara berkala juga menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat berkurang, sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. (2022). Determinan ketimpangan pembangunan ekonomi antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1-16.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (15 November 2024). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi*. Diakses pada 6 Desember 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk0IzI%3D/-metode-baru-indeks-pe-mbangunan-manusia-menurut-provinsi.html>
- Handraini, H., Frinald, A., Magriasti, L., & Hendranaldi. (2024). Konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Indonesia. *Jurnal Professional*, 11(2), 601-608.
- Istanti, D. J., Febriani, A., & Ariani, N. (2021). Desentralisasi Asimetris dalam Resolusi Konflik Separatisme Aceh dan Papua. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 257-269
- Sanur, D. (2020). Implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh [implementation of special autonomy policies in Aceh]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 65-83.

Simatupang, P., & Akib, H. (2011). Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks desentralisasi pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. (2014). *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.